

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI PERIODE 2024-2029

Dinda Thari Apriliani, Siti Tiara Maulia

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Jambi

Email: dindaa1604@gmail.com , sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Jumlah anggota legislatif terpilih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 yaitu 35 orang, namun hanya terdapat 5 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 14.286% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku dan hasil *library research* dari berbagai referensi yang merupakan bahan pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih berkembangnya budaya patriarki, perempuan tidak mendukung perempuan, partai politik tidak benar-benar berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan, kurangnya interaksi caleg perempuan dengan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislatif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Keterwakilan Perempuan, DPRD

Abstract

The lack of support for women is one of the factors that has not met the quota of 30% representation of women in the DPRD membership. The number of lawmakers in the district of Tanjung Jabung Barat for the period 2024-2029 is 35 people, but there are only 5 women legislature members or about 14.286% so that it has not reached the expected 30% representation of women. This research aims to find out how the representation of women in the DPRD district of Tanjung Jabung Barat period 2024-2029 and the inhibitory factors that influence. The research method used in this research is the study of literature. With the data collection technique using the method of collecting data that comes from journals, books and library research results of various references that are supporting material of writing related to the theory relevant to the problem discussed. The form of the method in this study is qualitative research descriptive, where emphasis is on the sources of data document presented conceptually then drawn conclusions in the form of narration. The results of the research show that the representation of women in the DPRD membership in the district of Tanjung Jabung Barat period 2024-2029 is still low. This is due to several factors, namely the still growing culture of patriarchy, women's disapproval of women, political parties' lack of genuine commitment to empowerment, lack of female interaction with society. Efforts can be made to increase the representation of women are to improve the quality of women's resources and encourage candidate female legislators to communicate with the public from the outset.

Keywords: Political Participation, Women Representation, DPRD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah-satu negara yang memiliki kementerian khusus perempuan yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) yang memiliki peran untuk melindungi hak-hak perempuan, salah satunya untuk melindungi perempuan dari diskriminasi gender karena diskriminasi gender terhadap perempuan sebagai warganegara baik dalam ruang publik maupun sebagai pelaku politik masih ada sampai saat ini.¹

¹ Suci Kurnia Sari, "Partisipasi Perempuan di Legislatif: Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Sosiologi Andalas* 6, no. 2 (2020), <http://jsa.fisip.unand.ac.id>.

Dalam bidang politik pemerintah telah berupaya untuk mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan dengan membuat kebijakan dalam pemilihan DPR, DPRD provinsi atau DPRD. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam daftar bakal calon minimal menyertakan 30% perempuan atau setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat minimal 1 (satu) orang perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang keterwakilan perempuan dalam dunia politik.²

Pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dilakukan dengan memberikan syarat bagi partai politik peserta pemilu agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berikut tabel jumlah keikutsertaan calon anggota DPRD Tanjung Jabung Barat berdasarkan parpol pada pemilu 2024:

Tabel 1.1: Data Calon Tetap Anggota DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2024-2029

No	Nama Partai Politik	Jenis Kelamin		% Keterwakilan Perempuan
		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	22	13	37.14%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	22	13	37.14%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21	13	38.24%
4	Partai Golongan Karya	22	13	37.14%
5	Parta NasDem	20	15	42.86%
6	Partai Buruh	6	2	25%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3	2	40%
8	Partai Keadilan Sejahtera	21	14	40%

² Ani Martini, Maichel Wutoy, Dan Perdana Dewi Wardhani, "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, No. 1 (30 Juni 2021): 14–22, <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>.

9	Partai Kebangkitan Nusantara	13	7	35%
10	Partai Amanat Nasional	20	15	42.86%
11	Partai Bulan Bintang	10	6	37.5%
12	Partai Demokrat	22	13	37.14%
13	Partai Solidaritas Indonesia	11	5	31.25%
14	Partai Perindo	18	12	40%
15	Partai Persatuan Pembangunan	23	12	34.29%
16	Partai Ummat	8	4	33.33%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 jumlah perempuan yang berpartisipasi menyalonkan diri sebagai wakil partai politik menunjukkan jumlah yang lumayan, setiap parpol sudah mengikutsertakan 30% perempuan dalam pencalonannya. Hal tersebut menunjukkan partisipasi perempuan untuk terjun ke dalam politik cukup tinggi.

Namun, dari hasil rekapitulasi pemilu tahun 2024 oleh KPU Tanjung Jabung Barat perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 hanya 5 orang dari 35 orang yang berhasil menduduki kursi DPRD, dimana dapat ditarik permasalahan persentase anggota DPRD perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 hanya sebesar 14.286% yang artinya belum memenuhi kuota 30% seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis menganggap menarik untuk membahas mengenai faktor penyebab kurangnya Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan DPRD Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Periode 2024-2029.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku dan hasil *library research* dari berbagai referensi yang merupakan bahan pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi.

PEMBAHASAN

Pemilihan Umum tahun 2024 sudah terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024. Upaya pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga sudah dilakukan dengan memberikan syarat bagi partai politik peserta pemilu agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menaikkan jumlah keterwakilan perempuan di dunia politi, dunia politik selalu terkait dengan ranah publik yang lebih dekat dengan laki-laki. Setiap sosio-kultural terikat pada tradisi budayanya, di mana mayoritas masyarakat Indonesia berpegang pada ideologi patriarki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 35 calon terpilih mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029, berikut nama dan parpol calon terpilih: M. Muh. Sjafril Simamora (PAN), Ahmad Hanif (Partai NasDem), Syufrayogi Syaiful (Partai Golkar), Endri Arvian (PPP), Hasmely Hasan (PDIP), Hj. Erliani (Partai Gerindra), Hery Saputra (PBB), Siti Maidina Herdiyanti (PAN), Muhammad Zaki (PKB), Jamal Darmawan (Partai Demokrat), Mariatul Kiftiah (PKS), Albert Chaniago (PAN), Dedi Hadi (Partai Golkar), H. Tamsir (Partai Gerindra), Hasan Basyri Harahap (Partai NasDem), H. Abdullah (PDIP), Dudi Purwadi (PDIP), Yetno (Partai NasDem), Doni Idris Saragih (PDIP), Wildawati (Partai Demokrat), Nurkholis (Partai Golkar), Agustinus Siahaan (PAN), Satria Tubagus Ryan Hermawan (PDIP), Sutejo (Partai Gerindra), Melda Arisandi (Partai NasDem), Dedy Irawan (PAN), H. Fahrizal (PKS), Jayus (PKB), Ishak (Partai Golkar), Hamdani (PDIP), Iqbal (PDIP), Tumirin (Partai NasDem), Lukas Cholikul (PAN), Ansari (PKB), H. Assek (Partai Gerindra). Dari 35 calon terpilih hanya 5 orang diantaranya perempuan, yaitu: Hj. Erliani, Siti Maidina Herdiyanti, Mariatul Kiftiah, Wildawati dan Melda Arisandi.

Berdasarkan temuan data diatas, rendahnya Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Periode 2024-2029 dapat dijelaskan ke dalam beberapa faktor, yaitu:

1. Masih berkembangnya budaya patriarki dan perbedaan gender di sebagian besar masyarakat Indonesia, dimana laki-laki lebih memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan. Dalam perspektif patriarki perempuan cenderung di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai seorang yang tidak memiliki kebebasan di semua bidang.³
2. Perempuan tidak mendukung perempuan. Artinya kurangnya kesadaran kaum perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan, karena perempuan tidak dipercayai dapat meningkatkan elektabilitas partai politik, hal ini berkaitan dengan kekuatan, finansial maupun modal sosial perempuan.
3. Partai politik tidak benar-benar berkomitmen untuk pemberdayaan perempuan, mereka hanya mengajukan kandidat legislatif perempuan untuk memenuhi persyaratan 30% dalam pemilu, tanpa memberikan pembekalan atau mempertimbangkan potensi mereka.⁴
4. Kurangnya interaksi dan keterlibatan calon legislatif perempuan dengan masyarakat, caleg perempuan hanya muncul saat pemilihan sehingga mereka tidak dikenal masyarakat. Namun, masyarakat masih kurang memahami pentingnya pemilu sebagai salah satu cara untuk membangun masa depan Indonesia yang berkeadilan gender.

KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan 35 calon terpilih sebagai anggota DPRD Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029. Akan tetapi, hanya terdapat 5 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 14.286% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanjung Barat.

Artikel ini menjelaskan faktor penyebab kurangnya jumlah keterwakilan perempuan di ranah legislatif. Hal ini disebabkan karena (1) Masih berkembangnya budaya patriarki dan perbedaan gender di sebagian besar masyarakat Indonesia, (2) Perempuan tidak mendukung perempuan. Artinya kurangnya kesadaran kaum perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan, (3) Partai politik tidak benar-benar berkomitmen untuk pemberdayaan Perempuan, (4) Kurangnya interaksi dan keterlibatan calon legislatif perempuan dengan Masyarakat.

³ Ramlan Darmansyah dan Ade Sartika, "Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)" (Pekanbaru, t.t.).

⁴ Muhammad Ar Rafii dan Elan Jaelani, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2 Maret 2024): 87–99, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.

Secara komprehensif, peran perempuan sangat terbatas dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan serta posisi kepemimpinan yang masih dipegang oleh laki-laki yang disebabkan oleh kondisi sosio-kultur yang mempersulit perempuan untuk terlibat secara penuh didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmansyah, Ramlan, Dan Ade Sartika. "Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)." Pekanbaru, T.T.
- Martini, Ani, Maichel Wutoy, Dan Perdana Dewi Wardhani. "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, No. 1 (30 Juni 2021): 14–22. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>.
- Rafii, Muhammad Ar, Dan Elan Jaelani. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan Di Legislatif." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2 Maret 2024): 87–99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.
- Sari, Suci Kurnia. "Partisipasi Perempuan Di Legislatif: Studi Kasus Dprd Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Sosiologi Andalas* 6, No. 2 (2020). <http://jsa.fisip.unand.ac.id>.